



Australian Government
Attorney-General's Department

Meningkatkan Perlindungan dan Pemulihan Hak Secara Perdata terkait Kawin Paksa

Makalah konsultasi

Juli 2024

Pengakuan Tanah Air

Kami mengakui wali tradisional Australia dan mengakui pertalian mereka yang berkelanjutan dengan daratan, laut dan komunitas. Kami memberi hormat kepada orang-orangnya, budayanya, dan para tetuanya di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

© Commonwealth of Australia 2024

Selain Emblem Persemakmuran, seluruh materi yang disajikan dalam terbitan ini diberikan berdasarkan Creative Commons Attribution 4.0 International Public License di <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>.

Ini berarti lisensi ini hanya berlaku pada materi sebagaimana yang diatur di dalam dokumen ini.

Rincian dari persyaratan lisensi yang relevan tersedia di situs web Creative Commons di <https://creativecommons.org>/ demikian pula kode hukum lengkap untuk lisensi CC BY 4.0 di <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>.

Penggunaan Emblem

Ketentuan yang mengatur penggunaan Emblem dirinci di

Situs web Departemen Perdana Menteri dan Kabinet— <https://www.pmc.gov.au/government/commonwealth-coat-arms>.

Daftar Isi

Bantuan dan dukungan.....	5
Catatan tentang istilah-istilah.....	5
Memberikan masukan.....	5
<i>Survei online atau masukan tertulis</i>	5
<i>Jalur konsultasi lainnya</i>	6
Masa konsultasi.....	6
Pertanyaan.....	6
Kata Pengantar.....	7
Kawin Paksa.....	7
Respons saat ini terhadap kawin paksa di Australia.....	8
<i>Layanan dukungan</i>	8
Prevalensi dan data.....	9
<i>Usia korban/penyintas</i>	9
Contoh Kasus.....	11
Proposal untuk konsultasi.....	13
Bagian 1 – Membangun pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga untuk meningkatkan akses korban/penyintas terhadap layanan keluarga dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.....	15
Hasil yang ingin dicapai.....	15
Ikhtisar.....	15
Proposal untuk umpan balik.....	16
Bagian 2 – Meningkatkan pendidikan dan peningkatan -kesadaran.....	17
Hasil yang ingin dicapai.....	17
Ikhtisar.....	17
Proposal untuk umpan balik.....	17
Bagian 3 – Memperkuat perlindungan dan pemulihan hak secara perdata.....	19
Hasil yang ingin dicapai.....	19
Ikhtisar.....	19
<i>Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata?</i>	19
<i>Perlindungan perdata apa yang tersedia saat ini?</i>	19
<i>Mengapa kita memerlukan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata yang lebih kuat terkait kawin paksa?</i>	20
Proposal untuk umpan balik.....	21
Opsi untuk mewujudkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata yang lebih baik.....	21
Peningkatan perlindungan dan pemulihan hak perdata – fitur-fitur utama.....	23

Faktor risiko dan hambatan dalam mencari dukungan	30
Mendukung anak-anak	31
Kesimpulan.....	31
Pertanyaan konsultasi gabungan.....	32
<i>Proposal untuk konsultasi</i>	<i>32</i>
<i>Bagian 1: Membangun pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga untuk meningkatkan akses korban/penyintas terhadap layanan keluarga dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.....</i>	<i>32</i>
<i>Bagian 2: Meningkatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran</i>	<i>32</i>
<i>Bagian 3: Memperkuat perlindungan dan pemulihan hak secara perdata</i>	<i>32</i>
<i>Proposal untuk umpan balik</i>	<i>32</i>
Landasan untuk Mengeluarkan Perintah.....	32
Cakupan Perintah.....	33
<i>Penggugat</i>	<i>33</i>
<i>Tergugat.....</i>	<i>33</i>
<i>Keinginan penyintas/korban</i>	<i>33</i>
<i>Perlindungan di ruang sidang dan bantuan melalui proses hukum</i>	<i>33</i>
<i>Perintah sementara dan sidang ex-parte</i>	<i>33</i>
<i>Pelayanan, Pemberlakuan dan Pelanggaran.....</i>	<i>33</i>
<i>Pemulihan Hak Lainnya.....</i>	<i>33</i>
<i>Faktor risiko dan hambatan dalam mencari dukungan.....</i>	<i>34</i>
<i>Mendukung anak-anak</i>	<i>34</i>

Bantuan dan dukungan

Kawin paksa merupakan permasalahan yang menantang dan membaca tulisan ini mungkin dapat memunculkan perasaan yang kuat bagi sebagian orang.

Jika ada kekhawatiran yang mendesak atas keselamatan Anda, keselamatan orang lain, atau ada keadaan darurat, hubungilah Triple Zero (000).

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang atau berisiko mengalami kawin paksa, Anda dapat membuat laporan ke [Polisi Federal Australia](#) atau menelepon 131 237, atau menghubungi [My Blue Sky](#) melalui situs web mereka atau dengan menelepon 02 9514 8115 (Senin-Jumat pukul 09.00 – 17.00), waktu Sydney). My Blue Sky adalah layanan nasional Australia untuk orang-orang yang mengalami kawin paksa atau khawatir akan dipaksa menikah.

Layanan berikut juga dapat memberi Anda bantuan dan dukungan:

- [Lifeline](#) (13 11 14) – Layanan dukungan nasional untuk keadaan krisis dan pencegahan bunuh diri, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu
- [1800Respect](#) (1800 737 732) – Layanan Konseling terkait masalah Pelecehan Seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Keluarga Nasional, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu
- [13YARN](#) (13 92 76) adalah saluran dukungan untuk warga Aborigin dan Selat Torres yang mengalami krisis, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu
- [Kids Helpline](#) – Dukungan nasional yang dirancang untuk anak-anak dan remaja (berusia 5 hingga 25 tahun) yang mengalami krisis, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Catatan tentang istilah-istilah

Makalah konsultasi ini menggunakan istilah 'korban/penyintas' untuk seseorang yang pernah mengalami kawin paksa atau yang pernah mengalami tindakan yang ditujukan untuk membuat seseorang menjalani kawin paksa. Kami paham bahwa individu yang pernah mengalami kawin paksa mungkin tidak merasa cocok dengan istilah ini.

Memberikan masukan

Makalah konsultasi ini mengundang komentar untuk memberi informasi bagi pemerintah Australia dalam upayanya untuk mengatasi kawin paksa melalui respons nasional yang terkoordinasi, termasuk melalui pengembangan model untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Kami ingin mendengar masukan dari seluruh anggota masyarakat, khususnya mereka yang pernah mengalami kawin paksa, komunitas yang terkena dampak kawin paksa, para praktisi hukum, penyedia layanan, petugas garis depan, kelompok komunitas, dan akademisi.

Survei online atau masukan tertulis

Untuk memberikan masukan sebagai tanggapan atas makalah konsultasi ini, kunjungi [Commonwealth Attorney-General's Department's Consultation Hub](#) (Pusat Konsultasi Departemen Kejaksaan Agung Persemakmuran) lalu klik 'Make a submission'. Ini akan membawa Anda ke survei online yang memuat pertanyaan-pernyataan konsultasi yang tercantum dalam makalah ini. Anda tidak perlu menjawab setiap pertanyaan. Anda boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan Anda atau organisasi Anda saja. Anda juga dapat mengunggah masukan yang berdiri sendiri melalui Pusat Konsultasi.

Tanggapan Anda dapat diserahkan dengan menuliskan nama Anda atau secara anonim. Jika Anda memberikan persetujuan kepada kami, kami akan mempublikasikan tanggapan-tanggapan Anda pada akhir masa konsultasi. Kami tidak akan memublikasikan tanggapan jika Anda tidak menyetujuinya, atau jika memublikasikan masukan tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum. Masukan dapat tunduk pada permintaan terkait kebebasan informasi, atau permintaan dari Parlemen.

Data pribadi yang didapat melalui proses konsultasi akan diperlakukan sesuai dengan *Undang-Undang Privasi Tahun 1988* (Persemakmuran). Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Departemen Kejaksaan Agung mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan data pribadi, silakan kunjungi [Kebijakan Privasi Departemen Kejaksaan Agung](#).

Jalur konsultasi lainnya

Jika Anda ingin memberikan tanggapan Anda secara tatap muka atau melalui panggilan video atau telepon, silakan hubungi ForcedMarriage@ag.gov.au.

Jika Anda ingin memberikan tanggapan Anda dalam bahasa selain bahasa Inggris, silakan hubungi ForcedMarriage@ag.gov.au.

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus lainnya dalam hal aksesibilitas, harap beri tahu kami dengan menghubungi ForcedMarriage@ag.gov.au.

Masa konsultasi

Konsultasi dimulai pada 29/07/2024 dan ditutup pada 23/09/2024.

Pertanyaan

Jika Anda ingin membicarakan umpan balik Anda, silakan hubungi ForcedMarriage@ag.gov.au.

Kata Pengantar

Semua lapisan pemerintahan Australia bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam makalah ini tidak mewakili pandangan yang disepakati oleh pemerintah Persemakmuran, negara-negara bagian atau teritori, atau mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan. Tanggapan atas makalah konsultasi ini akan menjadi masukan bagi upaya lebih lanjut oleh semua yurisdiksi Australia untuk mengembangkan dan menyetujui sebuah model guna meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata atas kawin paksa.

Setiap orang di Australia bebas memilih untuk menikah atau tidak, dengan siapa, dan kapan ia akan menikah. Membuat seseorang menikah padahal orang tersebut tidak menginginkannya tidak pernah dapat diterima dan merupakan kejahatan di Australia.

Seluruh lapisan pemerintahan Australia berkomitmen untuk bekerja sama melalui respons nasional yang terkoordinasi yang memperkuat perlindungan dan pemulihan hak secara perdata bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Kerja sama antar pemerintah sangat penting untuk mencapai model yang adil, mudah diakses, dan dapat diberlakukan, dan yang menjawab tantangan unik dalam respons terhadap kawin paksa, misalnya mencegah korban/penyintas dikeluarkan secara paksa dari Australia dan memberikan perlindungan bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Perlindungan dan pemulihan hak secara perdata yang lebih baik bertujuan untuk menyediakan alat intervensi dan pencegahan baru yang melengkapi respons terhadap kawin paksa yang telah ada di Australia, yang mencakup:

- jalur dukungan khusus terkait kawin paksa yang tersedia melalui program Pemerintah Australia yakni Program Dukungan dalam Penanganan Perdagangan Manusia
- pendanaan baru dari Pemerintah Australia untuk membentuk Program Dukungan Spesialis Penanganan Kawin Paksa pada tahun 2025, guna memberikan dukungan khusus serta pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran
- memberikan dana hibah kepada organisasi masyarakat untuk melaksanakan program-program untuk mengatasi kawin paksa dan mendukung mereka yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa
- MyBlueSky, layanan nasional khusus di Australia untuk orang-orang yang mengalami kawin paksa atau khawatir akan dipaksa menikah, yang dilaksanakan oleh Anti-Slavery Australia.

Masukan masyarakat Australia penting untuk memastikan bahwa upaya ini memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan perdata yang lebih baik bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Kawin Paksa

Kawin paksa terjadi ketika seseorang menikah tanpa menyetujuinya secara sukarela dan sepenuhnya karena ia telah dipaksa, diancam atau dikelabui, atau tidak mampu memahami hakikat dan dampak dari upacara perkawinan, atau berusia di bawah 16 tahun pada saat dinikahkan.

Kawin paksa dapat terjadi pada siapa saja dan dari latar belakang mana pun. Wanita muda dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling berisiko, namun orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, orientasi seksual, budaya atau agama dapat mengalami paksaan untuk menikah. Kawin paksa dianggap sebagai praktik yang mirip perbudakan di Australia, namun juga diakui sebagai sejenis kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga serta sejenis kekerasan berbasis gender. Kawin

paksa telah diidentifikasi sebagai isu yang perlu dipertimbangkan di dalam *Rencana Nasional untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anaknya (2022-2032)*.

Penting untuk dicatat bahwa kawin paksa berbeda dari perjodohan (*arranged marriage*) dan pernikahan palsu (*sham marriage*). Pernikahan sebagai hasil dijodohkan merupakan pernikahan yang sah dan terjadi ketika anggota keluarga atau masyarakat memainkan peran utama dalam memperkenalkan atau memilih pasangan, dan kedua belah pihak menyetujui pernikahan tersebut. Pernikahan palsu terjadi ketika kedua belah pihak secara sukarela menikah pura-pura untuk tujuan penipuan.

Respons saat ini terhadap kawin paksa di Australia

Tanggapan Australia terhadap kawin paksa merupakan bagian dari strategi Pemerintah Australia untuk memerangi bentuk-bentuk eksploitasi yang serius, termasuk perdagangan manusia, perbudakan dan praktik-praktik mirip perbudakan lainnya seperti penghambaan dan kerja paksa. Secara kolektif, praktik-praktik ini sering disebut sebagai 'perbudakan modern'.

Strategi Australia untuk memerangi perbudakan modern, termasuk kawin paksa, dituangkan dalam [Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Perbudakan Modern 2020 – 2025](#) (Rencana Aksi Nasional). Salah satu komitmen spesifik dalam Rencana Aksi Nasional adalah untuk mengembangkan model untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata bagi individu yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Persemakmuran tahun 1995 (Kitab Hukum Pidana) memuat pelanggaran-pelanggaran yang mengkriminalisasi kawin paksa. Ini diberlakukan pada tahun 2013. Berdasarkan Kitab Hukum Pidana, membuat seseorang menjalani kawin paksa, atau menjadi salah satu pihak dalam kawin paksa adalah tindakan ilegal. Kecuali jika Anda sendiri adalah menjadi korban kawin paksa, menjadi pihak dalam kawin paksa berarti Anda setuju untuk menikah dengan orang yang Anda ketahui atau curigai sebagai korban kawin paksa.

Polisi Federal Australia (AFP) adalah lembaga utama yang menyelidiki pelanggaran kawin paksa di Australia. AFP juga dapat memberi rujukan bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa untuk mendapatkan dukungan, termasuk akomodasi yang aman, dukungan keuangan, konseling, dan nasihat hukum imigrasi. Dukungan ini tersedia bahkan jika orang tersebut tidak ingin membantu penyelidikan atau penuntutan pidana.

Layanan dukungan

Dukungan diberikan melalui Program Dukungan untuk Orang yang Diperdagangkan (Support for Trafficked People Program atau STPP). -Program ini didanai oleh Pemerintah Australia dan dilaksanakan oleh Palang Merah Australia. STPP memberikan dukungan intensif hingga 200 hari bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Saat ini, hanya AFP yang dapat merujuk kliennya ke STPP. Namun, pada pertengahan tahun 2024, jalur rujukan tambahan ke STPP akan dibuat. Artinya, korban/penyintas akan dapat mengakses STPP melalui penyedia layanan masyarakat, tanpa perlu berhubungan dengan AFP. Setelah proses hibah kompetitif terbuka, Salvation Army terpilih untuk melaksanakan percontohan Jalur Rujukan Tambahan hingga 28 November 2025. Salvation Army akan menilai apakah korban/penyintas memenuhi syarat untuk bantuan STPP antara pukul 09.00 hingga 17.00 di setiap negara bagian dan teritori, dan menyediakan situs web dan layanan pesan untuk mengakses informasi di luar jam kerja.

Pemerintah Australia juga telah menjanjikan dana sebesar \$12,1 juta selama 5 tahun untuk membentuk Program Dukungan Spesialis Penanganan Kawin Paksa (Forced Marriage Specialist

Support Program atau FMSSP) yang baru, yang akan menjadi program penanganan kawin paksa nasional yang akan dimulai pada bulan Januari 2025. FMSSP akan memberikan dukungan pencegahan dan intervensi dini berdasarkan kebutuhan perseorangan bagi mereka yang berisiko atau pernah mengalami kawin paksa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, kesejahteraan, fisik dan sosial klien tersebut, termasuk akses penting terhadap konseling dan akomodasi darurat jika diperlukan. FMSSP akan menerapkan pendekatan 'tidak ada pintu yang salah', di mana orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa dapat mengakses program tersebut melalui 'titik masuk lunak' di seluruh komunitas. FMSSP juga akan mencakup inisiatif pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran yang baru, dengan bekerja sama dengan berbagai komunitas di Australia.

Untuk melengkapi pembentukan FMSSP, Pemerintah Australia telah menjanjikan dana sebesar \$2,2 juta untuk memperpanjang proyek Speak Now , yang dilaksanakan oleh Anti Slavery Australia, untuk melanjutkan upaya pencegahan kawin paksa melalui pendidikan, peningkatan kesadaran dan kolaborasi.

Prevalensi dan data

Jumlah laporan

Jumlah kasus kawin paksa yang dilaporkan ke AFP merupakan bagian yang signifikan dari seluruh laporan perbudakan modern. Kawin paksa sering kali tersembunyi, kurang dilaporkan, dan kurang terdeteksi. Korban/penyintas seringkali masih muda dan mungkin takut untuk memberi informasi dan membuat laporan. Pemaksaan dan kontrol juga dapat mencegah korban/penyintas mencari bantuan. Di Australia, penelitian menunjukkan hanya satu dari lima korban/penyintas perbudakan modern yang terdeteksi.

Tabel 1: Laporan perbudakan modern yang diterima AFP antara Tahun Fiskal 2018 hingga Tahun Fiskal 2023 (5 tahun)

	Tahun Fiskal 2018-19	Tahun Fiskal 2019-20	Tahun Fiskal 2020-21	Tahun Fiskal 2021-22	Tahun Fiskal 2022-23
Kawin Paksa	95	92	79	84	90
Jumlah laporan perbudakan modern	220	223	224	294	340

Usia korban/penyintas

Sebagian besar laporan kepada AFP melibatkan korban/penyintas yang berusia di bawah 18 tahun, dan sebagian besar dari mereka ini berusia di bawah 16 tahun. Sejak 1 Juli 2016 hingga 30 Juni 2022, 56% laporan melibatkan korban/penyintas berusia di bawah 18 tahun, dan 31% dari mereka berusia di bawah 16 tahun dan 25% berusia antara 16 dan 18 tahun.

Grafik 1: Laporan kawin paksa – Usia korban/penyintas pada saat pelaporan (analisis 5-tahun)



Catatan: Angka statistik ini berkaitan dengan laporan pelanggaran yang telah terjadi, percobaan pelanggaran, dan pelanggaran yang berisiko akan terjadi.

Contoh Kasus

Kisah-kisah di bawah ini memberikan contoh bagaimana seseorang dapat dipaksa menikah. Contoh-contoh berikut ini merupakan fiksi, tetapi dibuat berdasarkan skenario dalam kasus nyata.

Contoh Kasus

Yasmin adalah warga negara Australia berusia 15 tahun.

Yasmin pergi ke luar negeri untuk mengunjungi kakek dan neneknya sementara orang tuanya tetap di Australia. Tak lama kemudian dia mengetahui bahwa orang tuanya telah mengatur agar ia menikahi sepupunya, yang hampir 20 tahun lebih tua darinya, selama kunjungan ini. Yasmin mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tidak ingin menikah, namun mereka bersikeras bahwa pernikahan harus dilaksanakan, sambil menekankan pentingnya pernikahan ini bagi keluarga dan komunitas mereka.

Kerabat Yasmin mengambil paspornya dan membawanya ke rumah kerabat lain di bagian negara asal Yasmin yang tidak begitu ia kenal. Dia tidak diperbolehkan keluar rumah dan tidak diberikan akses telepon, kecuali jika orang tuanya yang meneleponnya.

Suatu hari, orang tua Yasmin meneleponnya untuk memberitahunya bahwa ia hanya bisa kembali ke Australia dan kembali bersekolah jika ia setuju untuk menikah dengan pria yang telah mereka pilih untuknya. Yasmin memberi tahu orang tuanya bahwa dia setuju untuk menikah dengan pria tersebut. Tetapi begitu ia mengakhiri panggilan dengan orang tuanya, ia langsung menghubungi teman dekatnya di Australia untuk menceritakan apa yang terjadi dan ia tidak ingin dinikahkan. Yasmin memberi tahu temannya bahwa ia tidak tahu di mana ia berada dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan. Temannya menghubungi organisasi komunitas lokal untuk mencari bantuan dan nasihat.

Contoh Kasus

Sam adalah pria gay berusia 20 tahun. Ia telah berkencan dengan pacarnya secara diam-diam selama dua tahun.

Orang tua Sam sangat tradisional pemikirannya. Sam sangat mengasihi orang tuanya dan takut mereka tidak menyetujui pacarnya.

Suatu hari, paman Sam melihat Sam bersama pacarnya dan memberi tahu orang tuanya. Ia meyakinkan orang tua Sam untuk segera menikahkan Sam dengan seorang wanita agar tidak merusak reputasi keluarga di komunitas mereka.

Tidak lama setelah itu, orang tuanya menemukan seorang wanita dari komunitas mereka yang setuju untuk menikah dengan Sam. Sam belum pernah bertemu dengan wanita ini sebelumnya dan mencoba memberi tahu keluarganya bahwa ia tidak ingin menikahinya. Paman Sam mengatakan kepada Sam bahwa ia bersikap egois dan mempermalukan keluarga mereka dan bersikeras agar orang tua Sam melanjutkan persiapan pernikahan. Sam mengalah dan menjalani upacara pernikahan resmi tetapi ia tidak bahagia dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Saat Sam menyuarkan hal ini, pamannya marah dan meyakinkan orang tua Sam untuk mencegahnya memutuskan pernikahan karena khawatir Sam akan kembali ke pacarnya.

Sam takut jika ia melaporkan hal ini kepada polisi orang tuanya akan mendapat masalah. Sam merasa dia mungkin bisa memohon kepada orang tuanya namun ia khawatir pamannya akan terus menekan orang tua Sam agar memaksanya untuk tetap dalam perkawinan itu.

Contoh Kasus

Zara berusia 17 tahun dan akan menyelesaikan Kelas 12 dalam beberapa bulan.

Ayah Zara sangat ketat dan suka mengontrol, dan Zara takut padanya. Ketika Zara berusia 15 tahun, ayahnya menjodohkannya dengan pria dari negara asalnya. Zara memohon kepada ayahnya dan meyakinkannya untuk menunggu sampai ia setidaknya menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya.

Kini setelah Zara hampir selesai sekolahnya, ayah Zara mulai mengurus perjalanan Zara ke negara asalnya untuk menikah dengan pria yang telah dipilihnya untuknya. Zara merasa ia tidak akan bisa meyakinkan ayahnya lagi dan ia tidak ingin pernikahan ini dilaksanakan.

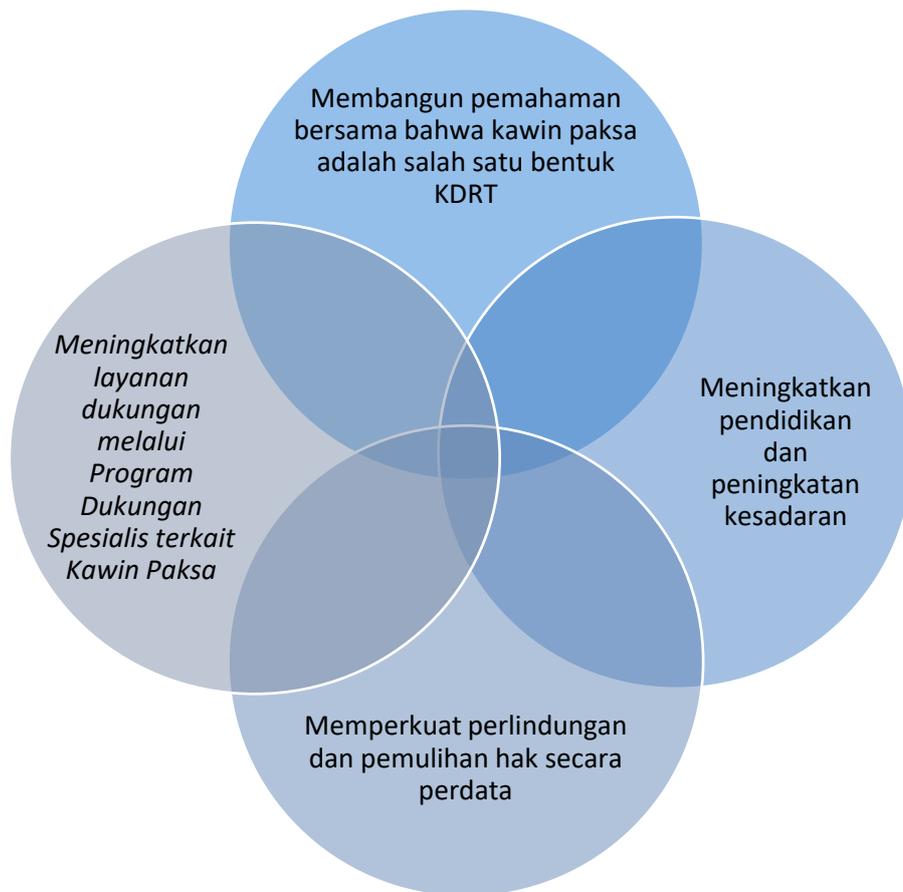
Saat tanggal perjalanannya semakin dekat, Zara menceritakan hal ini kepada gurunya. Karena Zara tinggal di NSW dan berusia 17 tahun, tindakan ini tidak wajib dilaporkan ke layanan perlindungan anak, jadi sekolah melapor ke Kepolisian NSW. Polisi bertemu dengan guru dan keluarga, dan sebagai hasilnya mereka menilai Zara berisiko mengalami kawin paksa.

Proposal untuk konsultasi

Makalah konsultasi ini menguraikan opsi-opsi rancangan model untuk memperkuat pendekatan Australia terhadap kawin paksa dan meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata pada kasus kawin paksa. Opsi-opsi ini, dan opsi-opsi lainnya, masih dalam pembahasan oleh seluruh lapisan pemerintah Australia dan masih harus dipertimbangkan dan diputuskan lebih lanjut. Tiga tindakan utama yang dipertimbangkan dalam makalah ini adalah:

1. **Membangun pemahaman bersama** mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga untuk meningkatkan akses korban/penyintas terhadap layanan keluarga dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga
2. **Meningkatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran** untuk mendukung identifikasi dini, intervensi dan pencegahan
3. **Memperkuat perlindungan dan pemulihan hak secara perdata** terkait kawin paksa, melalui
 - a. **Opsi A:** mengintegrasikan peningkatan perlindungan ke dalam kerangka kerja penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga yang telah ada di tingkat Persemakmuran, negara bagian dan teritori;
 - i. Hal ini dapat termasuk melalui pengembangan dan persetujuan prinsip-prinsip atau fitur-fitur bersama dari perlindungan yang lebih baik bagi berbagai yurisdiksi untuk diintegrasikan sebagaimana yang sesuai dengan kerangka kerja penanganan kekerasan keluarga dan rumah tangga, **atau**
 - b. **Opsi B:** menetapkan perlindungan baru melalui undang-undang Persemakmuran, dengan dukungan implementasi dari pemerintah negara bagian dan teritori

Upaya ini akan dilengkapi dengan komitmen Pemerintah Australia untuk meningkatkan dukungan bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa, dengan membentuk Program Dukungan Spesialis Penanganan Kawin Paksa, yang dimulai pada bulan Januari 2025.



Pertanyaan Konsultasi

1. Apakah pilihan-pilihan ini efektif untuk meningkatkan respons yang konsisten secara nasional terhadap kawin paksa? Apakah ada opsi lain yang harus dipertimbangkan?

Bagian 1 – Membangun pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga untuk meningkatkan akses korban/penyintas terhadap layanan keluarga dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga

Hasil yang ingin dicapai

Orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa dapat mengakses dukungan dan perlindungan melalui sistem penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga di setiap yurisdiksi Australia.

Ikhtisar

Kawin paksa umumnya terjadi dalam konteks keluarga. Namun, di seluruh Australia, pengakuan kawin paksa sebagai suatu bentuk kekerasan keluarga dan rumah tangga berbeda-beda. Misalnya, New South Wales, Victoria, dan South Australia mengakui kawin paksa sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga, namun Queensland, Western Australia, Tasmania, Northern Territory, dan Australian Capital Territory tidak secara eksplisit mengakui kawin paksa di dalam undang-undang yang relevan.

Kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga mencakup perlindungan dan dukungan yang dapat memberikan manfaat bagi korban-/penyintas kawin paksa. Perlindungan dan dukungan yang relevan dapat mencakup perintah perlindungan perdata, bantuan hukum, perawatan medis, konseling, bantuan keuangan dan akomodasi darurat. Namun, belum ada pengakuan yang konsisten bahwa kawin paksa adalah salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga. Akibatnya akses korban/penyintas kawin paksa terhadap perlindungan dan dukungan tersebut menjadi terbatas. Pada sebagian kasus, hal ini terjadi karena perlindungan dan dukungan yang relevan tidak tersedia bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Pada kasus lain, hambatan akses mungkin timbul karena kurangnya kesadaran atau pengakuan bahwa kawin paksa adalah salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga.

Jika kawin paksa diakui di semua yurisdiksi sebagai sejenis kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga, maka semua yurisdiksi tersebut juga perlu memberikan panduan mengenai definisi dan arti kawin paksa. Hal ini bisa dilakukan dengan mengacu pada definisi kawin paksa dalam *Kitab Hukum Pidana* (Persemakmuran), yang mendefinisikan bahwa kawin paksa terjadi ketika:

- a) salah satu pihak dalam perkawinan (korban) menjalani perkawinan tersebut tanpa menyetujuinya secara sepenuhnya dan dengan sukarela:
 - i. karena penggunaan paksaan, ancaman atau pengelabuan; atau
 - ii. karena korban tidak mampu memahami hakikat dan dampak dari upacara perkawinan yang diikutinya; atau
- b) pada saat perkawinan dilangsungkan, salah satu pihak dalam perkawinan (korban) berusia di bawah 16 tahun.

Proposal di bawah ini menguraikan tindakan-tindakan yang dapat membangun pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga di seluruh Australia, yang kemudian akan meningkatkan ketersediaan layanan keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga bagi para korban/penyintas kawin paksa.

Proposal untuk umpan balik

Tergantung pada yurisdiksinya, pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga dapat dicapai dengan:

- secara eksplisit memasukkan kawin paksa di dalam definisi-definisi kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga
- jika relevan, menjelaskan bahwa kawin paksa sudah termasuk dalam definisi kekerasan keluarga dan rumah tangga
 - misalnya dengan memasukkan kawin paksa sebagai salah satu contoh wajib dalam undang-undang untuk kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga
- mengembangkan kegiatan dan sumber daya pendidikan dan peningkatan kesadaran bersama-sama pemangku kepentingan utama agar kawin paksa lebih konsisten diakui sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga
- memastikan definisi kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga juga dapat berlaku untuk perilaku yang terjadi sebelum kawin paksa, termasuk pemaksaan, ancaman, dan pengelabuan dengan tujuan memaksa seseorang untuk menikah.

Pertanyaan Konsultasi

2. Haruskah kawin paksa diakui sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga? Mengapa?
3. Apa saja panduan hukum, perubahan kebijakan, atau panduan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengakuan bahwa kawin paksa adalah bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga?
4. Peningkatan atau tambahan panduan apa yang mungkin diperlukan untuk membantu agar layanan penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga secara konsisten mengakui kawin paksa sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga?

Bagian 2 – Meningkatkan pendidikan dan peningkatan -kesadaran

Hasil yang ingin dicapai

Pemahaman dan kesadaran mengenai kawin paksa meningkat di seluruh masyarakat dan semua organisasi, sehingga mengarah pada peningkatan identifikasi dan tanggapan yang sesuai dengan budaya dan tepat waktu terhadap kawin paksa oleh anggota masyarakat dan petugas garis depan.

Ikhtisar

Sejauh ini, masukan dari para pemangku kepentingan menekankan pentingnya memastikan peningkatan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata atas kawin paksa sebagai bagian dari respons holistik terhadap kawin paksa yang mencakup pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelatihan bagi para petugas di garis depan. Pendidikan dan peningkatan kesadaran juga dapat meningkatkan jumlah orang yang mencari dukungan, dan hal ini dapat berjalan seiring dengan layanan dukungan yang sesuai.

Pemerintah dari berbagai lapisan sedang mempertimbangkan cara yang paling efektif untuk bekerja sama guna memperkuat respons yang holistik dan terkoordinasi di semua yurisdiksi. Tindakan-tindakan ini akan berupaya untuk melengkapi proposal-proposal lain dalam makalah konsultasi ini, dan dapat mencakup kegiatan-kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran bersama layanan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga, layanan khusus terkait kawin paksa, responden garis depan lainnya, serta sistem peradilan. Kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran yang baru harus sesuai dengan budaya dan dikembangkan bersama komunitas yang terkena dampak kawin paksa.

FMSSP yang didanai Pemerintah Australia akan dimulai pada tahun 2025 dan diharapkan akan memiliki peran yang kuat dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat yang terdampak. Penyedia layanan yang terpilih akan membina hubungan dan jaringan di komunitas lokal, dan memberikan pendidikan dan peningkatan -kesadaran yang tepat target tentang kawin paksa dengan cara yang sesuai dengan budaya untuk mendorong perubahan perilaku dan memperkuat pertalian keluarga. FMSSP akan dievaluasi setelah 18 bulan beroperasi, sehingga memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kebutuhan pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk mendukung intervensi dini dan pencegahan kawin paksa.

Proposal untuk umpan balik

Daftar di bawah ini menyoroti kegiatan-kegiatan yang dapat dimajukan oleh pemerintah. Upaya untuk memperkuat pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai kawin paksa akan didasari oleh apa yang dipelajari dari pembentukan FMSSP dan kegiatan-kegiatan yang ada untuk mengatasi kawin paksa.

Kegiatan-kegiatan utamanya mungkin termasuk:

- peningkatan kesadaran yang ditargetkan, termasuk mengidentifikasi tanda-tanda kawin paksa dan cara meresponsnya, termasuk respons yang sesuai dengan budaya, mudah diakses, dan berdasarkan trauma
- meningkatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran
- peningkatan -kesadaran dan pendidikan yang ditargetkan bagi para petugas garis depan, termasuk penyedia layanan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga.

Pertanyaan Konsultasi

5. Topik apa saja yang dapat menjadi fokus dalam kegiatan-kegiatan pendidikan -dan peningkatan kesadaran?
6. Siapa yang harus terlibat dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran di komunitas yang terdampak kawin paksa?
7. Kelompok masyarakat manakah yang memerlukan pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai kawin paksa (misalnya pekerja garis depan seperti polisi, petugas perlindungan anak dan/atau kelompok tertentu dalam masyarakat)?

Bagian 3 – Memperkuat perlindungan dan pemulihan hak secara perdata

Hasil yang ingin dicapai

Peningkatan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata yang memberikan opsi intervensi dan pencegahan bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Ikhtisar

Saat ini, mekanisme perlindungan perdata bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa masih terbatas, tidak disesuaikan dengan konteks kawin paksa, dan berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Bagian ini dari proposal ini mempertimbangkan perlindungan yang mungkin paling berguna bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Hal ini termasuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dapat dicakup oleh perintah perlindungan dan kepada siapa perintah perlindungan tersebut dapat berlaku.

Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata?

Perlindungan dan pemulihan hak secara perdata adalah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang secara hukum dapat mewajibkan orang atau organisasi untuk bertindak, atau tidak bertindak, dengan cara tertentu. Perlindungan perdata dapat melindungi korban/penyintas dari kekerasan di masa depan dan tidak perlu diinisiasi oleh polisi. Perlindungan perdata dapat membuat persyaratan atau pembatasan dikenakan pada orang yang menerima perintah tersebut. Perlindungan perdata sering kali dapat diperintahkan oleh pengadilan dengan cepat, sehingga memberikan perlindungan yang sensitif terhadap waktu bagi mereka yang membutuhkannya.

Perlindungan perdata apa yang tersedia saat ini?

Semua yurisdiksi memiliki kerangka perlindungan perdata yang memberikan perlindungan kepada korban/penyintas kekerasan dalam keluarga, rumah tangga, dan pribadi. Kerangka kerja ini menawarkan serangkaian perlindungan, termasuk melarang tergugat menyakiti orang yang dilindungi atau menghubungi orang yang dilindungi. Perlindungan ini mungkin relevan bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Namun, terdapat juga kesenjangan dan keterbatasan dalam penerapan perlindungan perdata yang ada saat ini bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Misalnya, jenis perlindungan yang tersedia di seluruh yurisdiksi berbeda-beda, dan sebagian darinya hanya tersedia dalam kondisi terbatas, dan dalam konteks keluarga atau pasangan intim tertentu.

Berdasarkan *Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1975* (Persemakmuran), pengadilan dapat mengeluarkan surat perintah pengasuhan anak yang mengatur tentang pengaturan pengasuhan untuk seorang anak. Hal ini dapat mencakup segala perintah mengenai perawatan, kesejahteraan atau perkembangan anak. Dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat mengeluarkan perintah lokasi yang mengharuskan seseorang atau organisasi mana pun untuk memberikan informasi kepada pengadilan tentang lokasi seorang anak. Jika perintah pengasuhan anak dibuat untuk mencegah anak melakukan perjalanan internasional, permohonan dapat diajukan ke AFP agar rincian anak tersebut tercantum dalam Daftar Pengawasan di Bandara. Hal ini akan menghasilkan peringatan Sistem Izin dan Evakuasi Analisis Penumpang (PACE), yang memberikan peringatan untuk mencegah seorang anak meninggalkan Australia. Peringatan ini dapat digunakan untuk mencegah anak dibawa ke luar negeri untuk tujuan kawin paksa.

Namun, perintah pengasuhan anak dirancang untuk mengatur hubungan antara anak dan orang tua atau pengasuhnya, dan tidak dapat memberikan perlindungan bagi orang dewasa. Ini juga berarti bahwa orang dewasa tidak dapat dimasukkan dalam Daftar Pengawasan di Bandara.

Usulan peningkatan yang diuraikan di Bagian 3 bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam perlindungan perdata yang tersedia dan mencapai perlindungan yang lebih konsisten dan sesuai dengan tujuan bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Mengapa kita memerlukan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata yang lebih kuat terkait kawin paksa?

Respons peradilan pidana terhadap kawin paksa berperan penting sebagai alat pencegah, yang memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan ini tidak diterima di Australia. Perlindungan dan pemulihan hak secara perdata yang lebih kuat atas kawin paksa akan melengkapi respons peradilan pidana, memberikan alat praktis yang dapat mencapai hasil preventif dan tepat waktu bagi keselamatan dan kesejahteraan korban/penyintas. Penelitian di Australia telah menyoroti permasalahan perdagangan manusia dan perbudakan modern (termasuk kawin paksa) yang panjang dan rumit bagi polisi dan jaksa, yang terbukti membutuhkan waktu rata-rata lebih dari dua tahun untuk menyelesaikan perkara jenis ini, apa pun hasilnya. Selain itu, AFP juga seringkali terbatas perannya dalam langkah intervensi awal dan perlindungan yang dapat diberikan.

Secara internasional, Inggris Raya (UK) merupakan contoh negara yang telah menggunakan perlindungan perdata untuk membantu mengatasi kawin paksa. Pada tahun 2008, Inggris memberlakukan perintah perlindungan terhadap kawin paksa (Forced Marriage Protection Orders atau FMPO). Diberlakukannya FMPO didasari oleh rekomendasi dari para pemangku kepentingan bahwa perlindungan perdata, dan bukannya sanksi pidana, adalah cara yang paling tepat untuk mengatasi kawin paksa. Para pemangku kepentingan ini berpendapat bahwa banyak korban/penyintas yang enggan melihat keluarga mereka diadili. Akibatnya, lebih sedikit orang yang mencari bantuan. Penelitian di Inggris menunjukkan adanya peningkatan yang kuat dalam penggunaan FMPO, dengan sekitar 200-250 FMPO diberikan setiap tahunnya di Inggris dan Wales dari tahun 2014 hingga 2023.

Di Australia, penelitian akademis dan saran dari organisasi masyarakat sipil menggambarkan risiko yang dihadapi oleh korban/penyintas kawin paksa dan manfaat perangkat hukum, seperti perintah perlindungan perdata, untuk membantu korban/penyintas menghindari atau keluar dari kawin paksa. Penelitian ini berpendapat bahwa perlindungan perdata menyediakan alat tambahan yang lebih mudah diakses karena standar pembuktian yang diperlukan (pertimbangan probabilitas) lebih rendah dibandingkan dengan standar pembuktian yang diperlukan untuk hukuman pidana (tanpa keraguan yang beralasan). Sejalan dengan rekomendasi para pemangku kepentingan di Inggris, penelitian di Australia terhadap orang-orang yang menghadapi kawin paksa juga menunjukkan bahwa perintah perdata mungkin merupakan pilihan hukum yang lebih baik bagi sebagian orang yang mungkin takut anggota keluarga mereka akan ditangkap dan diadili.

Penyelidikan tingkat Parlemen sebelumnya telah mempertimbangkan tanggapan Australia terhadap kawin paksa dan bentuk perbudakan modern lainnya. Sejumlah masukan yang diajukan untuk penyelidikan ini menyoroti kesenjangan dalam kerangka hukum untuk melindungi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Masukan-masukan ini menekankan bahwa walaupun ada perlindungan yang tersedia untuk anak-anak, perlindungan serupa tidak tersedia untuk orang dewasa.

Dalam masukan ini, para pemangku kepentingan mengadvokasi penerapan kerangka kerja perdata yang memastikan tersedianya perlindungan bagi korban/penyintas tanpa memandang usia dan lokasi. Laporan akhir dari penyelidikan tersebut menganjurkan pemerintah Persemakmuran (pusat) untuk mempertimbangkan memperluas perintah perlindungan yang terkait kawin paksa kepada orang-orang berusia 18 tahun ke atas.

Proposal-proposal yang diuraikan dalam makalah ini akan berupaya untuk melengkapi respons terhadap kawin paksa yang sudah ada di Australia dengan memperkuat alat intervensi dan pencegahan yang dapat mencapai hasil yang tepat waktu bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Pengalaman Inggris, serta masukan dari pemangku kepentingan hingga saat ini, menunjukkan bahwa perlindungan sipil dan pemulihan hak perlu didukung oleh sistem layanan dukungan yang kuat, serta inisiatif pendidikan dan peningkatan kesadaran yang sesuai dengan budaya masyarakat di komunitas yang paling terkena dampak kawin paksa. Makalah konsultasi ini ingin mendapatkan pandangan mengenai dukungan, termasuk melalui sistem layanan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga, serta mengenai kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran. FMSSP yang baru juga akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat dukungan yang tersedia bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Proposal untuk umpan balik

Bagian di bawah ini mencari masukan mengenai usulan fitur-fitur utama dalam peningkatan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata atas kawin paksa, serta opsi untuk mewujudkan hal ini melalui undang-undang Persemakmuran atau dengan mengintegrasikan peningkatan tersebut ke dalam kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga yang ada. Fitur-fitur utama dan opsi-opsi utama yang diusulkan untuk mewujudkan hal ini akan didiskusikan dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh seluruh lapisan pemerintah Australia.

Opsi untuk mewujudkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata yang lebih baik

Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata sehubungan dengan kawin paksa. Dua dari opsi ini mungkin termasuk:

- **Opsi A:** mengintegrasikan peningkatan perlindungan ke dalam kerangka kerja penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga yang telah ada di tingkat Persemakmuran, negara bagian dan teritori;
 - Hal ini dapat termasuk melalui pengembangan dan persetujuan prinsip-prinsip atau fitur-fitur bersama dari perlindungan yang lebih baik bagi berbagai yurisdiksi untuk diintegrasikan sebagaimana yang sesuai dengan kerangka kerja penanganan kekerasan keluarga dan rumah tangga, **atau**
- **Opsi B:** menetapkan perlindungan baru melalui undang-undang Persemakmuran, dengan dukungan implementasi dari pemerintah negara bagian dan teritori.

Opsi A: Integrasi dengan kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga

Opsi A akan berupaya untuk mengintegrasikan peningkatan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata ke dalam kerangka kerja keluarga dan rumah tangga Persemakmuran, negara bagian dan teritori, dengan memanfaatkan keahlian dan sistem yang telah ada.

Penelitian menemukan hubungan antara kawin paksa dan kontrol koersif sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga, di mana pelaku yang menggunakan pola perilaku kasar

secara bertahap selama jangka panjang untuk memaksa anak-anak dan orang dewasa menikah. Opsi ini berupaya untuk mencerminkan keterkaitan ini, dengan memanfaatkan kerangka kerja dan keahlian yang telah ada di bidang kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga. Kerangka kerja kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga berbeda-beda di setiap yurisdiksi, dan di beberapa yurisdiksi, mungkin lebih tepat untuk mengintegrasikan perlindungan perdata untuk kawin paksa ke dalam kerangka alternatif. Misalnya, di Tasmania, *Undang-Undang Kekerasan Keluarga tahun 2004* (Tas) hanya mengatur tindakan yang dilakukan oleh pasangan seseorang saja, jadi mungkin lebih tepat untuk menempatkan perlindungan perdata bagi kawin paksa pada kerangka kerja alternatif.

Integrasi dengan sistem yang ada memberikan peluang untuk terhubung dengan dukungan yang lebih luas terhadap kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga, termasuk pengadilan, perlindungan, dan bantuan khusus. Memanfaatkan sistem yang ada juga dapat mengurangi risiko bahwa orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa harus ke berbagai pengadilan dan sistem untuk mengakses dukungan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

Untuk mengintegrasikan perlindungan terhadap kawin paksa ke dalam kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga, semua lapisan pemerintah Australia harus setuju untuk mengubah kerangka kerja mereka jika perlu untuk menerapkan perlindungan dan pemulihan hak yang lebih baik. Model ini memerlukan amandemen undang-undang di setiap yurisdiksi (jika diperlukan), yang mungkin menjadi rumit karena perbedaan kerangka kerja dan pendekatan legislatif di setiap yurisdiksi.

Pendidikan, peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas yang kuat juga akan diperlukan untuk mendukung implementasi, termasuk untuk petugas polisi dan pejabat garis depan lainnya, penyedia layanan, pengadilan dan sistem peradilan, serta masyarakat. Penguatan koordinasi antara berbagai lembaga dan penyedia layanan baik di tingkat Persemakmuran maupun negara bagian dan teritori akan menjadi sangat penting.

Pertukaran informasi antar yurisdiksi akan menjadi hal yang penting, dan dapat didukung melalui Skema Perintah KDRT Nasional (National Domestic Violence Order Scheme atau NDVOS), yang memungkinkan semua Perintah KDRT yang dikeluarkan di negara bagian atau teritori Australia mana pun secara otomatis diakui dan berlaku di seluruh Australia.

Prinsip bersama

Pertama, Opsi A dapat dimajukan melalui pengembangan prinsip-prinsip atau fitur-fitur bersama dari peningkatan perlindungan yang akan diintegrasikan oleh semua yurisdiksi ke dalam kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga mereka, atau kerangka kerja relevan lainnya.

Prinsip-prinsip atau fitur-fitur tersebut akan mendasari pendekatan semua yurisdiksi untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata atas kawin paksa. Prinsip-prinsip atau fitur-fitur tersebut juga dapat memandu implementasi proposal di Bagian 1 dan 2 makalah ini.

Dengan menyetujui prinsip-prinsip atau fitur-fitur peningkatan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata, pemerintah akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas dalam implementasinya. Sebuah yurisdiksi dapat memilih untuk menggunakan mekanisme yang ada, misalnya kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga, menetapkan kerangka kerja baru atau menggunakan metode lain yang lebih disukai untuk menanamkan dan menangani prinsip-prinsip tersebut.

Opsi B: Undang-Undang Persemakmuran yang Berdiri Sendiri

Opsi B berarti menetapkan perintah kawin paksa yang baru melalui Undang-Undang Persemakmuran (nasional) yang berdiri sendiri. Opsi B ini akan berupaya mencapai hasil perlindungan serupa seperti yang diusulkan dalam Opsi A.

Undang-Undang Persemakmuran yang berdiri sendiri memberikan peluang untuk menetapkan undang-undang nasional yang berlaku secara merata dan konsisten di semua yurisdiksi. Undang-undang ini akan memungkinkan pengadilan untuk mengeluarkan perintah yang memenuhi kebutuhan pencegahan dan perlindungan orang-orang yang mengalami atau yang berisiko mengalami kawin paksa.

Seperti halnya Opsi A, Opsi B memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara semua yurisdiksi untuk memastikan bahwa perintah-perintah Persemakmuran dapat diakses, tepat waktu, dan efektif. Misalnya, hal ini dapat dicapai dengan memberikan wewenang kepada pengadilan negara bagian dan teritori untuk menyidangkan permohonan untuk mendapatkan perintah tingkat Persemakmuran. Proses komunikasi dan pertukaran informasi yang efektif antar yurisdiksi akan berperan penting untuk koordinasi dan integrasi yang efektif, termasuk pertimbangan NDVOS. Demikian pula, Opsi B dapat mempertimbangkan peran polisi negara bagian dan teritori dalam menjalankan dan memberlakukan perintah.

Meskipun konsisten secara nasional, model ini berpotensi mengharuskan pemohon mengakses berbagai sistem untuk mencari perlindungan dan dukungan. Proses rujukan yang jelas, serta pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai hal ini, termasuk bagi petugas polisi dan pejabat garis depan lainnya, penyedia layanan, pengadilan dan lembaga peradilan, serta dengan masyarakat, sekali lagi akan menjadi hal yang penting untuk memitigasi risiko.

Pertanyaan Konsultasi

8. Menurut Anda, apakah ada kesenjangan dalam perlindungan hukum yang tersedia untuk menanggapi dan mencegah kawin paksa di Australia? Jika demikian, apa saja kesenjangan tersebut?
9. Makalah ini membahas dua opsi untuk memperkuat perlindungan hukum perdata: Opsi A (meningkatkan undang-undang yang ada, mungkin melalui prinsip-prinsip bersama) dan Opsi B (memperkenalkan undang-undang Persemakmuran yang berdiri sendiri). Manakah dari dua opsi penerapan tadi yang paling efektif dan mengapa? Apa saja risiko utamanya? Apakah ada opsi lain yang perlu dipertimbangkan?
10. Berdasarkan Opsi A, apakah terdapat alternatif kerangka kerja perlindungan perdata selain kerangka kerja penanganan KDRT yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan perdata sehubungan dengan kawin paksa?

Peningkatan perlindungan dan pemulihan hak perdata – fitur-fitur utama

Landasan untuk Mengeluarkan Perintah

'Landasan untuk mengeluarkan perintah' berarti alasan pengadilan dapat mengeluarkan perintah dan hal ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Misalnya, kerangka kerja perlindungan perdata negara bagian dan teritori pada umumnya menganggap keberadaan atau antisipasi terjadinya kekerasan sebagai alasan yang cukup untuk memberikan perlindungan perdata kepada seseorang.

Landasan potensial untuk mengeluarkan perintah untuk perlindungan perdata terkait kawin paksa dapat mencakup bahwa pengadilan meyakini, atas dasar pertimbangan probabilitas, bahwa seseorang mempunyai alasan wajar untuk takut bahwa mereka akan dipaksa menikah. Hal ini mungkin disebabkan oleh:

- ancaman bahaya terhadap orang tersebut (atau orang lain, misalnya saudara kandungnya)
- risiko atau ekspektasi akan dibawa ke luar negeri untuk tujuan kawin paksa, atau
- tergugat melakukan perilaku koersif untuk memaksakan perkawinan.

Landasan-landasan yang sudah ada dalam kerangka kerja negara bagian dan teritori juga akan tetap relevan, termasuk kekerasan yang sudah terjadi atau diantisipasi akan terjadi.

Pertanyaan Konsultasi

11. **Bukti apa, atau jenis tindakan, risiko atau bahaya lain yang terkait dengan kawin paksa yang harus dianggap sebagai landasan untuk memohon perintah perlindungan perdata atas kawin paksa?**

Cakupan Perintah

Cakupan perintah menguraikan serangkaian perintah atau tindakan yang mungkin dilakukan untuk mencegah terjadinya kawin paksa, membantu seseorang untuk keluar dari kawin paksa, atau membantu melindungi seseorang dari segala bahaya yang mungkin mereka alami sehubungan dengan kawin paksa (termasuk sebelum kawin paksa terjadi).

Cakupan perintah ini sedang dibahas dan dipertimbangkan oleh semua lapisan pemerintah Australia dan juga akan bergantung pada mekanisme implementasi yang dipilih (diuraikan dalam Opsi A dan B di atas). Pemerintah Australia akan memprioritaskan perlindungan perdata yang dapat mengatasi risiko dan bahaya paling umum dan signifikan yang dihadapi oleh orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Ini mungkin termasuk perintah yang:

- mencegah tergugat untuk memaksa, berusaha memaksa, membantu atau bersekongkol dalam perkawinan paksa yang melibatkan orang yang dilindungi
- menghalangi tergugat mengambil langkah-langkah untuk mengadakan perkawinan bagi orang yang dilindungi, misalnya mengajukan permohonan paspor bagi orang yang dilindungi, memesan tiket pesawat, menyewa penghulu/penyelenggara pernikahan atau mengisi surat pemberitahuan niat untuk menikah
- mencegah tergugat memaksa, mencoba memaksa atau memaksa seseorang untuk tetap berada dalam kawin paksa
- mencegah dikeluarkannya orang yang dilindungi dari Australia

- mencegah orang yang dilindungi dari melakukan perjalanan internasional, dalam keadaan luar biasa, dan diimbangi dengan pertimbangan hak asasi manusia
- mewajibkan agar paspor orang yang dilindungi diserahkan kepada Pengadilan, dalam keadaan luar biasa, dan diimbangi dengan pertimbangan hak asasi manusia
- mendukung repatriasi seseorang yang dibawa ke luar negeri untuk tujuan kawin paksa, termasuk dengan mewajibkan tergugat untuk membantu repatriasi orang yang dilindungi dengan cara yang ditentukan (misalnya memesan penerbangan bagi orang yang dilindungi untuk kembali ke Australia)
- mengharuskan tergugat untuk mengungkapkan di mana orang yang dilindungi
- mencegah tergugat memaksa, membantu, atau bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh perintah tersebut
- mencegah responden melakukan tindakan atau jenis kejahatan tertentu.

Cakupan yang diusulkan di atas mungkin berdampak pada aspek kehidupan masyarakat lainnya dan pemerintah Australia sedang mempertimbangkan permasalahan ini untuk menghindari konsekuensi yang tidak disengaja. Misalnya:

- visa seseorang mungkin terkait dengan status visa pasangan atau keluarganya dan pemberian perintah perlindungan dapat menyebabkan orang yang mensponsori mencabut dukungan untuk visa korban/penyintas
- mengeluarkan perintah perlindungan dapat meningkatkan risiko bahaya bagi anggota keluarga lain dari korban/penyintas, karena pelaku mungkin akan mencoba untuk lebih menekan korban/penyintas untuk menikah melalui anggota keluarga lainnya, misalnya saudara-saudara kandung.

Pertanyaan Konsultasi

12. Apakah proposal perlindungan yang tercantum di atas mengatasi risiko dan bahaya paling umum dan signifikan yang dihadapi oleh orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa, termasuk anak-anak? Jika tidak, apa lagi yang harus diatasi?
13. Apakah ada risiko lain atau konsekuensi yang tidak disengaja dari proposal perlindungan tersebut yang perlu dipertimbangkan?

Penggugat

Korban/penyintas- mungkin enggan atau tidak dapat mengajukan permohonan perintah perlindungan perdata karena berbagai alasan, termasuk usia, dan hambatan lain seperti hambatan budaya dan bahasa. Untuk mengatasi hal ini, diusulkan agar sejumlah orang diperbolehkan mengajukan permohonan perintah perlindungan perdata atas nama korban/penyintas. Yang berpotensi menjadi penggugat dapat mencakup:

- orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa
- orang tua atau wali, atas nama anak

- wali, atas nama seseorang yang berumur di atas 18 tahun yang mempunyai gangguan kemampuan untuk mengambil keputusan
- petugas polisi
- lembaga perlindungan anak, dan
- organisasi masyarakat tertentu, penyedia layanan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat lainnya

Mungkin juga ada gunanya mempertimbangkan ketentuan yang memperbolehkan pihak ketiga untuk mengajukan permohonan, dengan seizin Pengadilan. Meski pun jenis pemohon yang lebih banyak akan menyediakan lebih banyak jalur yang dapat diakses guna mendapatkan perlindungan perdata, mungkin ada juga risikonya, misalnya mempersulit pengadilan untuk menentukan apakah pemohon bertindak demi kepentingan korban/penyintas.

Pengadilan mungkin juga dapat membuat perintah atas mosi mereka sendiri tanpa permohonan, jika hal tersebut diperlukan dalam proses persidangan lain.

Pertanyaan Konsultasi

14. Apakah ada orang atau organisasi tambahan yang semestinya dapat mengajukan permohonan perlindungan perdata untuk kasus kawin paksa? Jika ya, siapa dan mengapa?
15. Apakah ada risiko yang terkait dengan pemberian kemampuan kepada individu atau organisasi tertentu untuk mengajukan permohonan perintah perlindungan? Jika ya, apa saja risiko-risiko tersebut dan bagaimana cara mengurangi risiko tersebut?

Tergugat

Tergugat adalah orang yang dikenai perintah perlindungan perdata. Dengan kata lain, tergugat adalah orang yang harus mengubah perilakunya agar bertindak sesuai dengan perintah. Berbagai yurisdiksi memiliki peraturan yang berbeda-beda mengenai siapa yang dapat menjadi tergugat dalam permohonan perintah perlindungan perdata. Misalnya, kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga di beberapa yurisdiksi hanya memperbolehkan perintah dikeluarkan terhadap anggota keluarga terdekat atau pasangan intim. Perintah pengasuhan anak berdasarkan *Undang-undang Hukum Keluarga tahun 1975* (Persemakmuran) memperbolehkan dikeluarkannya penetapan pengadilan terhadap siapa pun, jika pengadilan menganggap hal itu tepat untuk menjamin kesejahteraan anak.

Untuk meningkatkan perlindungan perdata atas kawin paksa, pemerintah Australia sedang mempertimbangkan apakah tepat untuk membuat definisi tergugat atau memberikan keleluasaan pengadilan untuk membuat perintah yang dapat berlaku pada siapa pun yang dianggapnya pantas. Dalam kasus kawin paksa, pihak yang menimbulkan risiko mungkin bukan anggota keluarga. Misalnya, orang yang berniat menjadi pasangan atau anggota masyarakat mungkin mencoba memaksa seseorang untuk menikah.

Yang berpotensi menjadi tergugat dapat mencakup:

- anggota keluarga, termasuk orang tua dan anggota keluarga besar
- orang yang berniat menjadi pasangan dari orang yang berisiko mengalami kawin paksa

- penghulu/penyelenggara pernikahan, termasuk untuk upacara keagamaan, budaya atau sipil
- orang lain yang terlibat dalam memaksa seseorang untuk menikah, termasuk ketika mereka memaksa, berusaha memaksa, membantu, atau bersekongkol untuk mengadakan kawin paksa.

Pertanyaan Konsultasi

16. Haruskah ada batasan mengenai siapa yang dapat menjadi tergugat dalam perlindungan perdata kawin paksa? Jika ya, bagaimana cara mendefinisikannya (misalnya hanya anggota keluarga)?

Keinginan penyintas/korban

Mempertimbangkan keinginan korban/penyintas -akan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa korban/penyintas dapat melaksanakan keinginan mereka melalui proses yang terkait dengan permohonan dan penerbitan perlindungan dan pemulihan hak perdata. Hal ini khususnya relevan untuk perintah apa pun yang mungkin berdampak pada hak asasi manusia dan kebebasan -korban/penyintas. Misalnya, untuk mencegah seseorang dibawa ke luar negeri untuk tujuan kawin paksa.

Mungkin juga terdapat kasus di mana orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa mendapat tekanan dari keluarga atau anggota masyarakat untuk mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui atau tidak ingin melanjutkan proses perintah perlindungan perdata. Oleh karena itu, penting bagi korban/penyintas untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dalam kasus-kasus seperti ini.

Untuk mengatasi kekhawatiran ini, diusulkan agar ada ketentuan yang mengizinkan pengadilan untuk mempertimbangkan keinginan dan perasaan orang yang dilindungi ketika membuat perintah. Hal ini memprioritaskan keinginan orang yang dilindungi dan juga mengakui potensi tekanan dan paksaan psikologis ekstrim yang dapat dialami oleh seseorang yang menghadapi kawin paksa.

Pertanyaan Konsultasi

17. Bagaimana cara mengatasi risiko korban/penyintas dipaksa untuk membatalkan perintah?
18. Bagaimana cara terbaik untuk mencari tahu dan memasukkan pandangan para korban/penyintas, termasuk anak-anak, ke dalam proses persidangan dan pemberian perlindungan perdata pada kasus kawin paksa?

Perlindungan di ruang sidang dan bantuan melalui proses hukum

Saat ini, di berbagai yurisdiksi tersedia perlindungan melalui sistem penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga, termasuk bagi saksi rentan atau saksi khusus yang mengajukan permohonan perlindungan perdata. Diusulkan agar orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa diberikan perlindungan yang sama di ruang sidang seperti saksi rentan lainnya.

Perlindungan di ruang sidang dapat mencegah intimidasi terhadap saksi dan mendukung keselamatan dan kesejahteraan mereka. Tergantung pada kondisi masing-masing, perlindungan dapat mencakup:

- pengaturan untuk memastikan korban/penyintas tidak perlu melihat tergugat, misalnya dengan menggunakan layar/sekat atau dengan memberikan kesaksian melalui tautan audio-visual
- didampingi seorang pendukung di pengadilan
- memberikan kesaksian di pengadilan tertutup
- tidak diperiksa silang oleh tergugat yang tidak diwakili pengacara.

Selain itu, pengadilan yang menjalankan yurisdiksi hukum keluarga memiliki kemampuan untuk menugaskan Pengacara Anak Independen dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, dalam keadaan tertentu.

Layanan dan tindakan lain mungkin juga tepat untuk menyederhanakan dukungan bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa yang mengajukan permohonan perlindungan perdata, termasuk:

- kegiatan-kegiatan pendidikan dan peningkatan -kesadaran bagi petugas garis depan, staf hukum, pengadilan dan sistem peradilan (lihat Bagian 2)
- layanan dukungan untuk membantu korban/penyintas membuat permohonan mereka, termasuk korban/penyintas dari komunitas beragam budaya dan bahasa
- jalur untuk merujuk mereka yang berisiko ke layanan dukungan yang didanai pemerintah seperti FMSSP.

Pemerintah Australia menyambut baik pandangan mengenai peluang untuk memperkuat dukungan bagi penyintas/korban kawin paksa ketika mereka terlibat dengan sistem hukum. Pandangan-pandangan ini akan dipertimbangkan dan didiskusikan lebih lanjut.

Pertanyaan Konsultasi

19. Dukungan lain apa yang sebaiknya tersedia bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa, termasuk anak-anak, untuk mendukung mereka menjalani proses permohonan perintah perlindungan perdata? Misalnya, dukungan tambahan saat melalui proses permohonan, atau perlindungan tambahan di ruang sidang.

Perintah sementara dan sidang ex-parte

Perintah sementara dan ex--parte memungkinkan permohonan perintah perlindungan perdata untuk segera disidangkan, tanpa memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya. Biasanya perintah-perintah ini jangka waktunya terbatas, sehingga memberikan perlindungan sampai permohonan dapat disidangkan pada proses pengadilan biasa.

Pengadilan pada umumnya bertanggung jawab untuk membuat perintah sementara atau perintah ex-parte. Namun, di semua yurisdiksi, petugas polisi dapat mengeluarkan perintah sementara dalam keadaan tertentu. Misalnya, petugas polisi sering kali dapat mengeluarkan perintah sementara, atau mengajukan permohonan perintah sementara melalui telepon, untuk memastikan keselamatan orang yang dilindungi.

Korban/penyintas -kawin paksa mungkin menghadapi berbagai risiko langsung terhadap keselamatan mereka, termasuk risiko dibuat meninggalkan Australia secara paksa. Oleh karena itu diusulkan agar perintah interim dan/atau ex--parte harus dapat dibuat oleh pengadilan jika

diperlukan untuk menjamin keselamatan korban/penyintas, sementara menunggu keputusan akhir pengadilan tentang permohonan perintah perlindungan perdata.

Pertanyaan Konsultasi

20. Landasan apa yang relevan untuk mengeluarkan perintah sementara jika seseorang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa?
21. Apakah perintah sementara sebaiknya dibatasi sehingga mencakup sebagian, namun tidak seluruh, cakupan perintah yang diusulkan (diuraikan dalam Cakupan Perintah)? Jika ya, perlindungan apa yang harus disertakan atau dikecualikan dan mengapa?
22. Bukti apa saja yang dapat menunjukkan adanya risiko kawin paksa dan harus dipertimbangkan oleh polisi ketika mempertimbangkan landasan untuk mengeluarkan perintah sementara jika seseorang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa?

Pelayanan, Pemberlakuan dan Pelanggaran

Di Australia, umumnya petugas polisi bertanggung jawab untuk menyampaikan surat perintah perlindungan perdata. Menugaskan polisi untuk menyampaikan surat perintah memberikan jaminan tingkat tinggi bahwa tergugat mengetahui adanya perintah tersebut, mendorong kepatuhan, akuntabilitas, dan jaminan keselamatan orang yang dilindungi.

Pada beberapa keadaan tertentu, mungkin surat perintah dapat disampaikan secara elektronik. Opsi ini memerlukan pertimbangan yang cermat untuk memastikan proses yang adil. Misalnya, surat perintah yang disampaikan secara elektronik mungkin hilang dalam 'spam', mungkin dianggap sebagai penipuan, atau mungkin tidak dapat diakses oleh tergugat yang tidak memiliki akses ke internet, berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam, atau memiliki persyaratan aksesibilitas lainnya.

Surat perintah terkait kawin paksa akan ditegakkan keberlakuannya oleh lembaga kepolisian terkait. Namun, jika peningkatan perlindungan diintegrasikan dengan kerangka kerja penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga di negara bagian dan teritori, perintah yang terkait dengan pembatasan perjalanan dan tindakan di luar Australia perlu dipertimbangkan lebih jauh karena yurisdiksi internasional pada umumnya merupakan lingkup Persemakmuran. Hal ini merupakan kompleksitas signifikan yang sedang dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemerintah Australia.

Di semua yurisdiksi Australia, pelanggaran terhadap perintah perlindungan perdata dapat dikenakan hukuman pidana. Demikian pula, pelanggaran perlindungan perdata bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa merupakan pelanggaran pidana.

Pertanyaan Konsultasi

23. Apakah ada keadaan di mana surat perintah tidak perlu disampaikan secara pribadi (misalnya penyampaian secara elektronik)? Jika ya, keadaan apa sajakah keadaan itu?

Pemulihan Hak Lainnya

Mungkin ada pemulihan hak lain yang dapat dipertimbangkan dalam sebuah model untuk memberikan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata yang lebih baik atas kawin paksa.

Misalnya, dapat dipertimbangkan untuk menyederhanakan proses bagi mereka yang mengalami kawin paksa untuk meminta pembatalan pernikahan.

Pertanyaan Konsultasi

24. Apakah ada pemulihan hak, selain perlindungan perdata, yang perlu dipertimbangkan bagi mereka yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa?
25. Saat ini, apakah korban/penyintas kawin paksa menghadapi hambatan atau kesulitan ketika meminta pernyataan ketidaksahan perkawinan sehubungan dengan kawin paksa yang mereka alami? Jika ya, bagaimana hambatan atau kesulitan tersebut dapat diatasi?

Faktor risiko dan hambatan dalam mencari dukungan

Kawin paksa tidak hanya terjadi pada satu kelompok budaya, agama, atau etnis. Namun, beberapa komunitas di Australia mungkin lebih terpapar terhadap faktor-faktor risiko yang mungkin terkait dengan kawin paksa. Hal ini dapat mencakup pengungsian yang baru terjadi, status visa sementara atau visa tanggungan, hambatan bahasa atau kurangnya dukungan dan jaringan masyarakat.

Orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa juga mungkin mengalami hambatan dalam mengakses dukungan. Hambatannya dapat mencakup rasisme, diskriminasi, kurangnya akses terhadap layanan yang aman secara budaya dan/atau kurangnya jalur pelaporan yang dapat diakses. Penyandang disabilitas juga mungkin mengalami faktor risiko tambahan, termasuk terbatasnya akses terhadap layanan dan jaringan dukungan yang sesuai dan aman.

Dimensi keluarga, budaya dan sosial yang kompleks terkait kawin paksa juga dapat menjadi penghalang dalam mencari dukungan. Misalnya, seorang remaja mungkin merasa tidak nyaman melaporkan tentang keluarga atau anggota komunitasnya.

Terlibat dalam proses hukum dapat menimbulkan rasa malu bagi keluarga dan masyarakat dan dapat meningkatkan risiko bagi orang yang mencari dukungan. Jika seseorang mengakses perlindungan hukum untuk kawin paksa, maka penting untuk mempertimbangkan dan mengurangi risiko yang terkait, dan memastikan orang yang mencari perlindungan tersebut mendapat dukungan yang sesuai.

Pertanyaan Konsultasi

26. Apa saja risiko dan hambatan dalam mencari dukungan bagi orang-orang yang berisiko atau mengalami kawin paksa? Strategi apa yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi hal ini?
27. Risiko dan hambatan apa yang mungkin dihadapi seseorang jika mereka mencari perlindungan melalui sistem hukum? Bagaimana risiko dan hambatan ini dapat dikurangi?
28. Keterlibatan dengan sistem pendukung dan sistem hukum dapat meningkatkan risiko bagi orang yang menghadapi kawin paksa. Apakah ada tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh petugas garis depan atau layanan hukum ketika seseorang mungkin berisiko mengalami kawin paksa?

Mendukung anak-anak

Laporan AFP menunjukkan bahwa sejak 1 Juli 2017 hingga 30 Juni 2022, 56% kasus kawin paksa yang dilaporkan kepada AFP berasal dari orang berusia di bawah 18 tahun, dan 31% berusia di bawah 16 tahun.

Perlindungan yang saat ini ada untuk anak-anak tersedia melalui kerangka kerja perlindungan anak negara bagian dan teritori dan melalui *Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1975* (Persemakmuran). Misalnya Undang-Undang Hukum Keluarga mengizinkan dikeluarkannya penetapan untuk melindungi anak-anak, termasuk penetapan terhadap siapa pun jika pengadilan menganggap hal tersebut tepat untuk menjamin kesejahteraan anak, dan mengizinkan anak-anak ditempatkan dalam Daftar Pengawasan di Bandara untuk mencegah mereka dibawa keluar dari Australia.

Namun, pertimbangan tambahan perlu diberikan pada dukungan spesifik dan kebutuhan akses bagi anak-anak yang ingin menghindari atau keluar dari kawin paksa. Misalnya, hal ini dapat mencakup pertimbangan mengenai dukungan tambahan apa pun yang mungkin dibutuhkan oleh anak-anak yang berisiko mengalami kawin paksa untuk mengakses dokumen dan formulir pengadilan, serta perlindungan yang sesuai di ruang sidang.

Pertanyaan Konsultasi

29. Dukungan dan perlindungan tambahan apa yang dapat dipertimbangkan untuk membantu anak-anak mengakses perlindungan hukum yang diusulkan dan membantu mereka menjalani proses permohonan, ruang sidang, dan proses hukum lainnya?

Kesimpulan

Nasihat yang diberikan melalui konsultasi ini akan menjadi masukan bagi seluruh upaya pemerintah Australia dalam mengembangkan model guna meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak terkait kawin paksa. Upaya ini terus berlanjut dan tunduk pada pertimbangan dan keputusan lebih lanjut oleh semua yurisdiksi.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar tambahan, Anda dipersilakan untuk menghubungi Departemen Kejaksaan Agung di ForcedMarriage@ag.gov.au.

Pertanyaan konsultasi gabungan

Proposal untuk konsultasi

1. Apakah pilihan-pilihan ini efektif untuk meningkatkan respons yang konsisten secara nasional terhadap kawin paksa? Apakah ada opsi lain yang harus dipertimbangkan?

Bagian 1: Membangun pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga untuk meningkatkan akses korban/penyintas terhadap layanan keluarga dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga

2. Haruskah kawin paksa diakui sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga? Mengapa?
3. Apa saja panduan hukum, perubahan kebijakan, atau panduan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengakuan bahwa kawin paksa adalah bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga?
4. Peningkatan atau panduan tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk membantu layanan penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga agar lebih konsisten mengenali kawin paksa sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga?

Bagian 2: Meningkatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran

5. Topik apa saja yang dapat menjadi fokus dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran?
6. Siapa yang harus terlibat dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran di komunitas yang terdampak kawin paksa?
7. Kelompok masyarakat manakah yang memerlukan pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai kawin paksa (misalnya pekerja garis depan seperti polisi, petugas perlindungan anak dan/atau kelompok tertentu dalam masyarakat)?

Bagian 3: Memperkuat perlindungan dan pemulihan hak secara perdata

Proposal untuk umpan balik

8. Menurut Anda, apakah ada kesenjangan dalam perlindungan hukum yang tersedia untuk menanggapi dan mencegah kawin paksa di Australia? Jika ya, apa saja kesenjangan tersebut dan apakah kesenjangan tersebut memerlukan respons nasional?
9. Makalah ini membahas dua opsi untuk memperkuat perlindungan hukum perdata: Opsi A (meningkatkan undang-undang yang ada, mungkin melalui prinsip-prinsip bersama) dan Opsi B (memperkenalkan undang-undang Persemakmuran yang berdiri sendiri). Manakah dari dua opsi penerapan tadi yang paling efektif dan mengapa? Apa saja risiko utamanya? Apakah ada opsi lain yang perlu dipertimbangkan?
10. Berdasarkan Opsi A, apakah terdapat alternatif kerangka perlindungan perdata selain kerangka kerja penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan perdata atas kawin paksa?

Landasan untuk Mengeluarkan Perintah

11. Bukti apa, atau jenis tindakan, risiko atau bahaya lain yang terkait dengan kawin paksa yang harus dianggap sebagai landasan untuk memohon perintah perlindungan perdata atas kawin paksa?

Cakupan Perintah

12. Apakah proposal perlindungan yang tercantum di atas mengatasi risiko dan bahaya paling umum dan signifikan yang dihadapi oleh orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa, termasuk anak-anak? Jika tidak, apa lagi yang harus diatasi?
13. Apakah ada risiko lain atau konsekuensi yang tidak disengaja dari proposal perlindungan tersebut yang perlu dipertimbangkan?

Penggugat

14. Apakah ada orang atau organisasi tambahan yang semestinya dapat mengajukan permohonan perlindungan perdata untuk kasus kawin paksa? Jika ya, siapa dan mengapa?
15. Apakah ada risiko yang terkait dengan pemberian kemampuan kepada individu atau organisasi tertentu untuk mengajukan permohonan perintah perlindungan? Jika ya, apa saja risiko-risiko tersebut dan bagaimana cara mengurangi risiko tersebut?

Tergugat

16. Haruskah ada batasan mengenai siapa yang dapat menjadi tergugat dalam perlindungan perdata kawin paksa? Jika ya, bagaimana cara mendefinisikannya (misalnya hanya anggota keluarga)?

Keinginan penyintas/korban

17. Bagaimana cara mengatasi risiko korban/penyintas dipaksa untuk membatalkan perintah?
18. Bagaimana cara terbaik untuk mencari tahu dan memasukkan pandangan para korban/penyintas, termasuk anak-anak, ke dalam proses persidangan dan pemberian perlindungan perdata pada kasus kawin paksa?

Perlindungan di ruang sidang dan bantuan melalui proses hukum

19. Dukungan lain apa yang sebaiknya tersedia bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa, termasuk anak-anak, untuk mendukung mereka menjalani proses permohonan perintah perlindungan perdata? Misalnya, dukungan tambahan saat melalui proses permohonan, atau perlindungan tambahan di ruang sidang.

Perintah sementara dan sidang ex-parte

20. Landasan apa yang relevan untuk mengeluarkan perintah sementara jika seseorang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa?
21. Apakah perintah sementara sebaiknya dibatasi sehingga mencakup sebagian, namun tidak seluruh, cakupan perintah yang diusulkan (diuraikan dalam Cakupan Perintah)? Jika ya, perlindungan apa yang harus disertakan atau dikecualikan dan mengapa?
22. Bukti apa saja yang dapat menunjukkan adanya risiko kawin paksa dan harus dipertimbangkan oleh polisi ketika mempertimbangkan landasan untuk mengeluarkan perintah sementara jika seseorang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa?

Pelayanan, Pemberlakuan dan Pelanggaran

23. Apakah ada keadaan di mana surat perintah tidak perlu disampaikan secara pribadi (misalnya penyampaian secara elektronik)? Jika ya, keadaan apa sajakah keadaan itu?

Pemulihan Hak Lainnya

24. Apakah ada pemulihan hak, selain perlindungan perdata, yang perlu dipertimbangkan bagi mereka yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa?
25. Saat ini, apakah korban/penyintas kawin paksa menghadapi hambatan atau kesulitan ketika meminta pernyataan ketidaksahan perkawinan sehubungan dengan kawin paksa yang mereka alami? Jika ya, bagaimana hambatan atau kesulitan tersebut dapat diatasi?

Faktor risiko dan hambatan dalam mencari dukungan

26. Apa saja risiko dan hambatan dalam mencari dukungan bagi orang-orang yang berisiko atau mengalami kawin paksa? Strategi apa yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi hal ini?
27. Risiko dan hambatan apa yang mungkin dihadapi seseorang jika mereka mencari perlindungan melalui sistem hukum? Bagaimana risiko dan hambatan ini dapat dikurangi?
28. Terlibat dalam sistem dukungan dan sistem hukum dapat meningkatkan risiko bagi orang yang menghadapi kawin paksa. Apakah ada tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh petugas garis depan atau layanan hukum ketika seseorang mungkin berisiko mengalami kawin paksa?

Mendukung anak-anak

29. Dukungan dan perlindungan tambahan apa yang dapat dipertimbangkan untuk membantu anak-anak mengakses perlindungan hukum yang diusulkan dan membantu mereka menjalani proses permohonan, ruang sidang, dan proses hukum lainnya?